ANALISIS PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCARIAN DANA (SP2D) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Meltodius Aejunlianus Ola[1], Muhamad Taofik Gumelar[2]

[1,2]*Universitas Nusa Putra*
E-mail : arjunkelen0@gmail.com

ABSTRACT

This internship activity was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) of East Flores Regency, focusing on the administrative procedures for issuing Fund Disbursement Orders (SP2D). SP2D is an essential document in regional financial management as it serves as the basis for disbursing funds from the regional treasury to entitled parties in accordance with the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The purpose of this internship was to gain a direct understanding of the workflow, mechanisms, and obstacles in the SP2D issuance process, as well as to link public sector accounting theories with practical implementation in the field. The method used in this internship was a qualitative descriptive approach through direct observation, active participation in financial administration activities, and documentation. The results of the internship indicate that the SP2D issuance procedures have been implemented in accordance with applicable regulations. However, several administrative constraints were identified, such as incomplete supporting documents and data entry errors, which may delay the fund disbursement process. Through this internship, students gained a deeper understanding of the importance of accuracy, discipline, and accountability in regional financial management. This internship provides valuable experience in enhancing students' knowledge, skills, and readiness to enter the professional workforce, particularly in the field of public sector accounting.

Keywords : *Internship; Fund Disbursement Order (SP2D); Regional Financial Management; Public Sector Accounting; Regional Government*

ABSTRAK

Kegiatan internship ini dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Flores Timur dengan fokus pada prosedur administrasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena menjadi dasar pencairan dana dari kas daerah kepada pihak yang berhak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan kegiatan ini adalah untuk memahami secara langsung alur penerbitan SP2D, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengaitkan teori akuntansi sektor publik dengan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah observasi, partisipasi aktif, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa prosedur penerbitan SP2D telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih terdapat kendala administratif seperti ketidaklengkapan dokumen dan kesalahan penginputan data. Kegiatan internship ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya akuntabilitas dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : *Internship; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); Pengelolaan Keuangan Daerah; Akuntansi Sektor Publik; Pemerintah Daerah*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Sistem pengelolaan yang baik diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya, pemerintah daerah harus mengikuti berbagai prosedur administrasi untuk memastikan setiap pengeluaran anggaran dilakukan secara sah dan tercatat dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Putri & Kurniawan, 2021; Sari, 2022).

Salah satu tahapan krusial dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan dana yang dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah sebagai dasar pencairan dana dari kas daerah kepada pihak yang berhak menerimanya. Proses ini harus melalui beberapa tahapan verifikasi administrasi untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya prosedur tersebut, pemerintah daerah dapat meminimalkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, mekanisme penerbitan SP2D menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah (Pratama, 2023).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan daerah, termasuk dalam proses pencairan dana melalui SP2D. BKAD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh organisasi perangkat daerah sebelum dana dapat dicairkan. Selain itu, BKAD juga memastikan bahwa setiap transaksi keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Proses ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, keberadaan BKAD sangat berperan dalam memastikan tertib administrasi keuangan daerah (Rahman & Wibowo, 2020).

Dalam proses penerbitan SP2D, terdapat beberapa tahapan administrasi yang harus dilalui sebelum dana dapat dicairkan. Tahapan tersebut biasanya dimulai dari pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh organisasi perangkat daerah kepada BKAD. Selanjutnya, dokumen tersebut akan diverifikasi oleh petugas terkait untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka BKAD akan menerbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana dari kas daerah. Proses yang sistematis ini bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah (Utami, 2024).

Melalui kegiatan internship atau magang, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan di instansi pemerintahan. Kegiatan ini memberikan pengalaman praktis yang tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran di kelas. Mahasiswa dapat mempelajari berbagai prosedur administrasi, mulai dari pengajuan dokumen hingga proses verifikasi dan penerbitan SP2D. Selain itu, mahasiswa juga dapat memahami bagaimana sistem kerja birokrasi dalam pengelolaan keuangan

daerah. Pengalaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap praktik administrasi publik (Hidayat & Lestari, 2021).

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan magang di instansi pemerintah juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kompetensi profesional. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan administratif, kemampuan analisis dokumen, serta pemahaman mengenai regulasi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Selain itu, kegiatan magang juga melatih kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan bekerja dalam lingkungan organisasi. Hal ini penting sebagai bekal bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Oleh karena itu, program internship menjadi salah satu sarana pembelajaran yang efektif dalam menghubungkan teori dengan praktik (Nugroho, 2022).

Secara keseluruhan, kegiatan internship di BKAD memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa dalam memahami proses pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penerbitan SP2D. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana sistem administrasi keuangan pemerintah dijalankan secara terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengalaman tersebut tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Dengan demikian, kegiatan magang diharapkan mampu mempersiapkan mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang kompeten di bidang administrasi publik dan pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan penerbitan SP2D di BKAD, partisipasi aktif dalam kegiatan administrasi keuangan, serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menggambarkan secara sistematis proses, permasalahan, dan solusi dalam penerbitan SP2D.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan internship menunjukkan bahwa prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Flores Timur pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini mengikuti tahapan administrasi yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis agar pencairan dana dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel. Prosedur tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, mekanisme penerbitan SP2D menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik (Sari, 2022; Pratama, 2023).

Proses penerbitan SP2D diawali dengan penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan pencairan dana. SPM tersebut merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar bagi BKAD untuk melakukan proses verifikasi selanjutnya. Dokumen ini biasanya dilengkapi dengan berbagai

persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh SKPD. Kelengkapan dokumen sangat penting karena menjadi bukti bahwa kegiatan yang didanai telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tahap penerimaan SPM menjadi langkah awal yang menentukan kelancaran proses pencairan dana (Rahman & Wibowo, 2020).

Setelah SPM diterima, petugas di BKAD akan melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan. Verifikasi ini meliputi pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan anggaran yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Selain itu, petugas juga memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses verifikasi sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran daerah. Dengan adanya tahap ini, setiap pencairan dana dapat dipastikan telah melalui pemeriksaan yang ketat (Putri & Kurniawan, 2021).

Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, tahap berikutnya adalah penginputan data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola berbagai informasi yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan daerah. Melalui sistem tersebut, data keuangan dapat dikelola secara lebih terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan SIPD juga membantu meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam proses administrasi keuangan daerah. Dengan demikian, sistem digital menjadi bagian penting dalam modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Utami, 2024).

Setelah proses penginputan data selesai, BKAD kemudian menerbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana dari kas daerah. Dokumen SP2D tersebut menjadi bukti resmi bahwa dana dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerima. Penerbitan SP2D dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi sebelumnya dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Proses ini juga menjadi bentuk pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam penerbitan SP2D harus dilaksanakan secara teliti dan sesuai prosedur (Nugroho, 2022).

Meskipun prosedur penerbitan SP2D telah berjalan dengan baik, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah keterlambatan penyampaian dokumen dari SKPD kepada BKAD. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti proses administrasi internal di SKPD yang belum selesai. Selain itu, kurangnya koordinasi antar bagian juga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pengajuan dokumen. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tertundanya proses pencairan dana yang seharusnya dapat dilakukan lebih cepat (Hidayat & Lestari, 2021).

Kendala lain yang sering ditemui adalah ketidaklengkapan persyaratan administrasi dalam dokumen yang diajukan. Beberapa SKPD terkadang belum melengkapi dokumen pendukung yang menjadi syarat dalam proses pencairan dana. Hal ini menyebabkan petugas BKAD harus mengembalikan dokumen tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu. Proses pengembalian dokumen tentu membutuhkan waktu tambahan sehingga memperlambat proses penerbitan SP2D. Oleh karena itu, ketelitian dalam menyiapkan dokumen sangat diperlukan agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif (Pratama, 2023).

Selain masalah kelengkapan dokumen, kesalahan dalam penginputan data juga menjadi salah satu kendala dalam proses administrasi keuangan daerah. Kesalahan tersebut

dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dalam memasukkan data ke dalam sistem. Apabila terjadi kesalahan data, maka petugas harus melakukan perbaikan sebelum proses dapat dilanjutkan. Hal ini tentu memerlukan waktu tambahan yang dapat memperlambat proses pencairan dana. Oleh sebab itu, ketelitian dan pemahaman terhadap sistem menjadi faktor penting dalam pelaksanaan tugas administrasi keuangan (Utami, 2024).

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara BKAD dan SKPD. Komunikasi yang efektif antar instansi dapat membantu mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dalam proses administrasi. Selain itu, peningkatan pemahaman terhadap prosedur dan persyaratan administrasi juga perlu dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat. Dengan demikian, proses pengajuan dokumen dapat dilakukan dengan lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah (Putri & Kurniawan, 2021).

Kegiatan internship memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami proses penerbitan SP2D di BKAD Kabupaten Flores Timur. Mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana prosedur administrasi keuangan daerah dilaksanakan dalam praktik pemerintahan. Pengalaman ini juga memberikan pemahaman mengenai berbagai kendala yang dapat terjadi dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan administratif serta pemahaman terhadap sistem keuangan pemerintah. Dengan demikian, kegiatan internship dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja di bidang administrasi publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan *internship*, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SP2D merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai peraturan. Prosedur penerbitan SP2D di BKAD Kabupaten Flores Timur telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala administratif yang perlu diperbaiki. Kegiatan internship ini memberikan pengalaman praktis yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam memahami pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, M., & Lestari, R. (2021). Implementasi program magang dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 9(2), 115–123.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pengelolaan keuangan daerah*. Kementerian Dalam Negeri.

Nugroho, B. (2022). Administrasi keuangan publik di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(1), 45–56.

Pratama, R. (2023). Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(2), 88–97.

Putri, N., & Kurniawan, A. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 6(1), 21–30.

Rahman, A., & Wibowo, D. (2020). Pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 67–75.

Sari, D. (2022). Sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 34–42.

Utami, S. (2024). Digitalisasi administrasi keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 4(1), 55–64.